



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 815 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berupa penyediaan sarana dan prasarana pada unit penyelenggara pelayanan publik;
bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan di dapat dari akumulasi aspek pemenuhan, aspek kualitas dan aspek pendukung yang kemudian dikonversi dalam bentuk kategori penilaian.
- KETIGA : Kategori penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KEEMPAT : Tata urutan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak menggambarkan peringkat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 30 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 815 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023

DAFTAR HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023

A. LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1.	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu	UPP TERBAIK
2.	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	UPP TERBAIK
3.	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru	UPP TERBAIK
4.	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda	UPP TERBAIK
5.	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai	UPP TERBAIK
6.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	Sangat Baik
7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	Sangat Baik
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	Sangat Baik
9.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	UPP TERBAIK
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Sangat Baik

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
11.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	Baik
12.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	UPP TERBAIK
13.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	UPP TERBAIK
14.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Batam	Sangat Baik
15.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Surakarta	UPP TERBAIK
16.	Kementerian Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta	Sangat Baik
17.	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Sangat Baik
18.	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli	UPP TERBAIK
19.	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	UPP TERBAIK
20.	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Sangat Baik
21.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sangat Baik
22.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD PPA Provinsi DKI Jakarta	Baik
23.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Baik
24.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau	Sangat Baik
25.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD PPA Kabupaten Sleman	Baik
26.	Kementerian Sosial	Sentra Terpadu Kartini Temanggung	UPP TERBAIK
27.	Kementerian Sosial	Sentra Terpadu Prof. DR. Soeharso Surakarta	UPP TERBAIK
28.	Kementerian Sosial	Sentra Wirajaya Makassar	Sangat Baik

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
29.	Kementerian Sosial	Sentra Handayani Jakarta	UPP TERBAIK
30.	Kementerian Sosial	Sentra Antasena Magelang	Sangat Baik
31.	Kementerian Perhubungan	Terminal Tipe A Guntur Melati Garut	UPP TERBAIK
32.	Kementerian Perhubungan	Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa	Sangat Baik
33.	Kementerian Perhubungan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan	UPP TERBAIK
34.	Kementerian Perhubungan	Stasiun Cikarang	UPP TERBAIK
35.	Kementerian Perhubungan	Terminal Tipe A Jatijajar	Sangat Baik
36.	Kementerian Kesehatan	RSUP Persahabatan Jakarta	Baik
37.	Kementerian Kesehatan	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	Cukup
38.	Kementerian Kesehatan	RS Kanker Dharmais Jakarta	Sangat Baik
39.	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Pontianak	NA
40.	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Makassar	Cukup
41.	Kementerian Pariwisata	Gedung Sapta Pesona	Baik
42.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Bali	Cukup
43.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Lombok	Baik
44.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Bandung	Cukup
45.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Palembang	Cukup
46.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Unit Layanan Terpadu, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi	Sangat Baik
47.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia	UPP TERBAIK
48.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	UPP TERBAIK
49.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	UPP TERBAIK
50.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Kota Medan	UPP TERBAIK
51.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan	UPP TERBAIK
52.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	UPP TERBAIK

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
53.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar	UPP TERBAIK
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	UPP TERBAIK
55.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta	UPP TERBAIK
56.	Kementerian Perindustrian	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	Sangat Baik
57.	Kementerian Perindustrian	Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang	Sangat Baik
58.	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Argo	Baik
59.	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	Sangat Baik
60.	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	Baik
61.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Jakarta Selatan	Sangat Baik
62.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Jakarta Timur	Cukup
63.	Kementerian Ketenagakerjaan	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta	Baik
64.	Kementerian Ketenagakerjaan	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat	Sangat Baik
65.	Kementerian Ketenagakerjaan	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda	UPP TERBAIK
66.	Mahkamah Agung	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Sangat Baik
67.	Mahkamah Agung	Pengadilan Negeri Singaraja	UPP TERBAIK
68.	Mahkamah Agung	Pengadilan Agama Yogyakarta	UPP TERBAIK
69.	Mahkamah Agung	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	UPP TERBAIK
70.	Mahkamah Agung	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Baik
71.	Kepolisian RI	Polres Metro Tangerang Kota	UPP TERBAIK

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
72.	Kepolisian RI	Polresta Malang Kota	UPP TERBAIK
73.	Kepolisian RI	Polres Gianyar	Sangat Baik
74.	Kepolisian RI	Polres Kota Baru	UPP TERBAIK
75.	Kepolisian RI	Polres Barito Selatan	UPP TERBAIK
76.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	UPP TERBAIK
77.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi Bali	UPP TERBAIK
78.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	UPP TERBAIK
79.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	UPP TERBAIK
80.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Negeri Mataram	UPP TERBAIK
81.	Badan Narkotika Nasional	Balai Besar Rehabilitasi BNN	Sangat Baik
82.	Badan Narkotika Nasional	Pusat Laboratorium Narkotika BNN	UPP TERBAIK
83.	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Batam	Sangat Baik
84.	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Baddoka	Sangat Baik
85.	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	UPP TERBAIK
86.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	UPP TERBAIK
87.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	UPP TERBAIK
88.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Denpasar	UPP TERBAIK
89.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Surabaya	UPP TERBAIK
90.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Serang	Sangat Baik

B. LINGKUP PROVINSI

NO.	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1.	Provinsi Aceh	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
2.	Provinsi Aceh	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	Baik
3.	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Cukup
4.	Provinsi Sumatera Utara	Dinas Sosial	Cukup
5.	Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
6.	Provinsi Sumatera Barat	UPTD Samsat Padang	Baik
7.	Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perpustakaan Daerah	Cukup
8.	Provinsi Sumatera Selatan	Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah	Baik
9.	Provinsi Riau	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sangat Baik

NO.	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
10.	Provinsi Riau	Badan Pendapatan Daerah/ UPT SAMSAT Pekanbaru Kota	Baik
11.	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
12.	Provinsi Kepulauan Riau	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang	Baik
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cukup
14.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik
15.	Provinsi Bengkulu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
16.	Provinsi Bengkulu	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus	Cukup
17.	Provinsi Jambi	Perpustakaan Daerah	Sangat Baik
18.	Provinsi Jambi	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher	Baik
19.	Provinsi Lampung	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Cukup
20.	Provinsi Lampung	Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek	Sangat Baik
21.	Provinsi Banten	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
22.	Provinsi Banten	Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Cukup
23.	Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin	UPP TERBAIK
24.	Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	Sangat Baik
25.	Provinsi Jawa Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
26.	Provinsi Jawa Barat	Museum Sri Baduga – UPTD Pengelolaan Kebudayaan	Cukup
27.	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sangat Baik
28.	Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo	Sangat Baik
29.	Provinsi DI Yogyakarta	Balai Layanan Perpustakaan	Sangat Baik
30.	Provinsi DI Yogyakarta	Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	Sangat Baik
31.	Provinsi Jawa Timur	Perpustakaan Provinsi Jawa Timur	UPP TERBAIK
32.	Provinsi Jawa Timur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	UPP TERBAIK

NO.	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
33.	Provinsi Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik
34.	Provinsi Bali	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara	Sangat Baik
35.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Cukup
36.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Baik
37.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cukup
38.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cukup
39.	Provinsi Kalimantan Barat	Perpustakaan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Cukup
40.	Provinsi Kalimantan Barat	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Badan Pendapatan Daerah	Sangat Baik
41.	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Perpustakaan	Cukup
42.	Provinsi Kalimantan Timur	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Sangat Baik
43.	Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Baik
44.	Provinsi Kalimantan Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus	Baik
45.	Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
46.	Provinsi Kalimantan Selatan	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	Baik
47.	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
48.	Provinsi Kalimantan Utara	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	Baik
49.	Provinsi Sulawesi Selatan	UPT Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
50.	Provinsi Sulawesi Selatan	UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi	Cukup
51.	Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Cukup
52.	Provinsi Sulawesi Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Undata	Cukup
53.	Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Cukup
54.	Provinsi Sulawesi Barat	Rumah Sakit Umum Daerah	Cukup

NO.	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
55.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Perpustakaan Daerah	Baik
56.	Provinsi Sulawesi Tenggara	UPTB Samsat Kota Kendari	Baik
57.	Provinsi Sulawesi Utara	Perpustakaan Daerah	Baik
58.	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cukup
59.	Provinsi Gorontalo	Perpustakaan Umum HB Jassin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baik
60.	Provinsi Gorontalo	Dinas Sosial	Cukup
61.	Provinsi Maluku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Cukup
62.	Provinsi Maluku	UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon	NA
63.	Provinsi Maluku Utara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	NA
64.	Provinsi Maluku Utara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	NA
65.	Provinsi Papua	Perpustakaan Daerah	Cukup
66.	Provinsi Papua	UPTD Panti Bina Sosial di Sentani	NA
67.	Provinsi Papua Barat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	NA
68.	Provinsi Papua Barat	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	NA

C. LINGKUP KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1.	Kota Banda Aceh	Puskesmas Meuraxa	Baik
2.	Kota Banda Aceh	Kantor Kecamatan Jaya Baru	Cukup
3.	Kota Medan	UPT Puskesmas Padang Bulan	Baik
4.	Kota Medan	Kantor Kecamatan Medan Tuntungan	Baik
5.	Kota Padang	Puskesmas Andalas	Cukup
6.	Kota Padang	Kantor Kecamatan Lubuk Begalung	Cukup
7.	Kota Palembang	Puskesmas Dempo	Sangat Baik
8.	Kota Palembang	Kantor Kecamatan Ilir Timur Satu	Baik
9.	Kota Pekanbaru	Puskesmas Rejosari	Baik
10.	Kota Pekanbaru	Kantor Kecamatan Bukit Raya	Cukup
11.	Kota Tanjungpinang	Puskesmas Batu 10	Baik

NO.	KABUPATEN/KOTA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
12.	Kota Tanjungpinang	Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat	Baik
13.	Kota Pangkalpinang	Puskesmas Tamansari	Cukup
14.	Kota Pangkalpinang	Kantor Kecamatan Girimaya	Cukup
15.	Kota Bengkulu	Puskesmas Penurunan	Cukup
16.	Kota Bengkulu	Kantor Kecamatan Ratu Samban	Cukup
17.	Kota Jambi	Puskesmas Tanjung Pinang	Sangat Baik
18.	Kota Jambi	Kantor Kecamatan Jelutung	Sangat Baik
19.	Kota Bandar Lampung	Puskesmas Way Halim II	Sangat Baik
20.	Kota Bandar Lampung	Kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat	Cukup
21.	Kota Serang	Puskesmas Singandaru	Cukup
22.	Kota Serang	Kantor Kecamatan Kasemen	Baik
23.	Kota Jakarta Pusat	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang	UPP TERBAIK
24.	Kota Jakarta Pusat	Kantor Kecamatan Menteng	Sangat Baik
25.	Kota Bandung	Puskesmas Pasirkaliki	Baik
26.	Kota Bandung	Kantor Kecamatan Bandung Kidul	Baik
27.	Kota Semarang	Puskesmas Poncol	Sangat Baik
28.	Kota Semarang	Kantor Kecamatan Semarang Barat	Sangat Baik
29.	Kota Yogyakarta	UPT Puskesmas Mergangsan	Sangat Baik
30.	Kota Yogyakarta	Kantor Kecamatan Umbulharjo	Baik
31.	Kota Surabaya	Puskesmas Pucang Sewu	Sangat Baik
32.	Kota Surabaya	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Sangat Baik
33.	Kota Denpasar	Puskesmas I Denpasar Selatan	Sangat Baik
34.	Kota Denpasar	Kantor Kecamatan Denpasar Selatan	UPP TERBAIK
35.	Kota Mataram	UPT Puskesmas Karang Taliwang	Cukup
36.	Kota Mataram	Kantor Kecamatan Selaparang	Cukup
37.	Kota Kupang	Puskesmas Oebobo	Cukup
38.	Kota Kupang	Kantor Kecamatan Maulafa	Cukup
39.	Kota Pontianak	UPT Puskesmas Gang Sehat	Sangat Baik
40.	Kota Pontianak	Kantor Kecamatan Pontianak Utara	Baik
41.	Kota Samarinda	UPTD Puskesmas Lempake	Baik
42.	Kota Samarinda	Kantor Kecamatan Samarinda Ilir	Baik
43.	Kota Palangkaraya	PKM Menteng	Cukup
44.	Kota Palangkaraya	Kantor Kecamatan Pahandut	NA
45.	Kota Banjarbaru	Puskesmas Guntung Manggis	Sangat Baik

NO.	KABUPATEN/KOTA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
46.	Kota Banjarbaru	Kecamatan Landasan Ulin	Baik
47.	Kabupaten Bulungan	Puskesmas Tanjung Selor	Sangat Baik
48.	Kabupaten Bulungan	Kantor Kecamatan Tanjung Selor	Baik
49.	Kota Makassar	Puskesmas Kassi-Kassi	Baik
50.	Kota Makassar	Kantor Kecamatan Tamalate	Cukup
51.	Kota Palu	Puskesmas Talise	NA
52.	Kota Palu	Kantor Kecamatan Palu Selatan	NA
53.	Kabupaten Mamuju	Puskesmas Binanga	Baik
54.	Kabupaten Mamuju	Kantor Kecamatan Mamuju	NA
55.	Kota Kendari	Puskesmas Poasia	Cukup
56.	Kota Kendari	Kantor Kecamatan Poasia	NA
57.	Kota Manado	Puskesmas Paniki Bawah	Baik
58.	Kota Manado	Kantor Kecamatan Wenang	Cukup
59.	Kota Gorontalo	Puskesmas Kota Barat	Cukup
60.	Kota Gorontalo	Kantor Kecamatan Dumbo Raya	NA
61.	Kota Ambon	Puskesmas Waihaong	Baik
62.	Kota Ambon	Kantor Kecamatan Sirimau	Baik
63.	Kota Ternate	Puskesmas Siko	NA
64.	Kota Ternate	Kantor Kecamatan Ternate Selatan	NA
65.	Kota Jayapura	Puskesmas Abepura	Cukup
66.	Kota Jayapura	Distrik Jayapura Utara	Cukup
67.	Kota Manokwari	Puskesmas Sanggeng	Baik
68.	Kota Manokwari	Distrik Manokwari Barat	NA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 815 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023

KATEGORI PENILAIAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023

Rentang Nilai	Kategori
91 - 100	UPP Terbaik
81 - 90	Sangat Baik
61 - 80	Baik
1 - 60	Cukup
0	NA

Keterangan:

NA adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditunjuk untuk dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS